

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Telah banyak yang melakukan penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Peneliti harus melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan sebelumnya. Penulisan penelitian terdahulu ini sangat diperlukan untuk mendukung pembahasan dari suatu permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, selain itu juga diperlukan untuk dijadikan suatu acuan untuk mendukung pembahasan yang ada. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti yaitu:

Menurut Nurlaila (2018) bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sukma Citra Ceramic yang ada di Malang belum dapat menerapkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dikarenakan keterbatasan waktu dan juga Sumber Daya Manusia yang belum memahami mengenai standar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti (2017) yang memberikan hasil penelitian sangat tidak berbeda jauh dari penelitian Nurlaila dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditelitinya belum melaksanakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Marsa Devany (2017), Ni Komang Isma Dewi (2017), Djuwito (2017), Ketut Ari Warsadi (2017), dan Fransiskus Damien (2017) yang hasil penelitiannya sangat tidak beda jauh, bahwasanya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mereka lakukan penelitian belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan prosedur Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bellamita Padamandari (2017) yang menyatakan bahwa dari beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang telah ia teliti ada beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang siap untuk menerapkan prosedur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan mereka meskipun ada beberapa dari informan yang mereka wawancarai tetapi setidaknya ada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mengubah laporan keuangan mereka menjadi lebih baik lagi sesuai dengan prosedur Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Nurul Fatimah (2017) yang memberikan hasil penelitian yang tidak berbeda jauh dengan penelitian Bellamita Padamandari.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

Pada tanggal 1 Januari 2018 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) akan memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru khusus untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di Indonesia yang saat ini jumlahnya sebesar 57 juta.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM, 2016), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mengatakan bahwa entitas mikro kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang sudah ditetapkan didalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang telah memenuhi definisi serta kriteria ekonomi mikro kecil dan menengah sebagaimana yang telah diatur didalam perundang-undangan di Indonesia paling tidak selama dua tahun berturut-turut. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dikatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi maka

diizinkan untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) jika otoritas yang terkait telah mengizinkan.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak Memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi para pengguna eksternal. Contoh dari pengguna eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung didalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau sudah dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Ketentuan yang ada didalam UU No.20, selain terkait kekayaan bersih dan omset namun ada dua hal penting yang harus diketahui yaitu:

1. Usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun secara tidak langsung
2. Tidak memiliki atau menguasai mitra usahanya

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sangat tepat di era sekarang ini, mengingat sangat

pesatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tentu saja membutuhkan sebuah standar yang baku untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan mereka. Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ini para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu untuk segera melakukan penyesuaian pencatatan dan juga pelaporan keuangan.

### **2.2.2. Manfaat dan Tujuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ini dimaksudkan agar semua jenis unit usaha dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus mengalami perkembangan. Untuk mengembangkan suatu usaha diperlukan banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu dari upaya tersebut adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud dari pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akan membantu para manajemen perusahaan untuk mendapatkan berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan suatu perusahaan dimasa yang akan datang dapat memperoleh peminjaman dana dari pihak ketiga dan lain sebagainya.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (2016), Standar Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) ini disusun dengan cara yang cukup sederhana sehingga tidak menyulitkan bagi para penggunanya yang merupakan perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. Sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan diatas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas namun sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang dimana kegiatan dan modalnya masih sangat terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia cukup banyak sekitar 80%, oleh karena itu

perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.

### **2.2.3. Karakteristik Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

1. Standar akuntansi yang berdiri sendiri (tidak mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan umum)
2. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis
3. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan umum

Dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa karakteristik dari segi kualitatif, yaitu:

#### **1. Dapat Dipahami**

Kualitas penting dari sebuah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh para penggunanya. Untuk maksud ini, para pengguna diasumsikan telah memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang cukup wajar. Namun dengan demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami namun tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan sebuah pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh beberapa pengguna tertentu.

#### **2. Relevan**

Agar informasi bermanfaat maka informasi harus relevan dengan kebutuhan para pengguna untuk proses pengambilan sebuah keputusan.

Informasi memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa dimasa lalu, masa kini dan juga dimasa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa yang telah lalu.

### 3. Materialitas

Sebuah informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi sebuah keputusan ekonomi para pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari suatu kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau suatu kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun dengan demikian, tidak tepat jika membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) agar dapat mencapai penyajian tertentu dari sebuah posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

### 4. Keandalan

Agar informasi yang disajikan bermanfaat maka informasi yang disajikan dalam laporan harus andal. Informasi memiliki kualitas yang andal jika terbebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa adanya yang sesuai dengan apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

### 5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi serta peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk

hukumnya saja. Hal ini juga untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

#### 6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan juga keadaan yang dapat dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dalam keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung suatu unsur kehati-hatian pada saat melakukan suatu pertimbangan yang diperlukan pada kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak pula disajikan lebih rendah. Namun dengan demikian, penggunaan pertimbangan sehat sangat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

#### 7. Kelengkapan

Agar sebuah informasi dapat diandalkan maka informasi didalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Suatu kesengajaan untuk tidak mengungkapkan dapat mengakibatkan sebuah informasi menjadi tidak benar atau dapat dikatakan menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi untuk ditinjau dari segi relevansi.

#### 8. Dapat Dibandingkan

Para pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Para pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk dapat mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dari dampak keuangan transaksi dan peristiwa

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan juga untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, para pengguna laporan keuangan harus mendapatkan sebuah informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan juga pengaruh dari dampak perubahan tersebut.

#### 9. Tepat Waktu

Agar informasi relevan maka informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi bagi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan suatu informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam sebuah pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dengan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dengan keandalan maka pertimbangan yang utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dalam mengambil suatu keputusan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Manfaat dari sebuah informasi seharusnya melebihi dari biaya penyediaannya. Namun dengan demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh para pengguna yang menikmati manfaatnya. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, suatu entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga sebuah manfaat yang dinikmati oleh para pengguna eksternal (SAK EMKM, 2016).

### **2.2.4. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

1. Biaya Historis

Aset adalah jumlah kas atau setara dengan kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara dengan kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

2. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan sesuatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

**2.2.5. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) bertujuan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum financial bagi pengguna eksternal. Contoh dari pengguna eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, investor, saham dan lain sebagainya.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain yang bertujuan untuk penerbitan efek dipasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi,

pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM, 2016) entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) jika pihak otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

#### **2.2.6. Konsep Entitas Bisnis dan Kesatuan Usaha**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM, 2016) dalam akuntansi konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha menjadi suatu hal yang penting karena bertujuan supaya transaksi perusahaan tidak dicampuradukkan, keuangan perusahaan harus terpisah dari keuangan dari direktur utama, karyawan atau keuangan pemilik.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan hasil usaha suatu entitas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menegaskan bahwa dalam hal entitas tidak memenuhi asumsi dasar konsep entitas bisnis ini, meskipun telah memenuhi syarat kualitatif dan kuantitatif dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) maka entitas tersebut memilih opsi untuk tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

#### **2.2.7. Penyajian Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

##### **1. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan dengan wajar mensyaratkan penyajian yang jujur atas dasar pengaruh transaksi, peristiwa dan juga kondisi lain yang sesuai dengan definisi serta kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban.

Pengungkapan dibutuhkan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu didalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tidak memadai sebagai pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Laporan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2015). Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi yang dapat dipahami juga memenuhi kebutuhan para penggunanya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari argumen menyesatkan, terhindar dari kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan diperiode-periode sebelumnya merupakan kualitas laporan keuangan yang baik (Maulana, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan.

## 2. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

## 3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) membuat penilaian atas dasar kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas memiliki kelangsungan usaha kecuali jika manajemen memiliki maksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali dengan melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika pihak

manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas tersebut harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan bersamaan dengan dasar penyusunan laporan keuangan beserta alasan mengapa entitas dianggap tidak memiliki kelangsungan usaha.

#### 4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum selama satu tahun sekali. Ketika pada saat akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk masa periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut
- b. Alasan penggunaan untuk masa periode yang lebih panjang atau lebih pendek
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk sebuah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya untuk diperbandingkan.

#### 5. Penyajian yang Konsisten

Penyajian serta klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang cukup signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian memiliki tujuan untuk menghasilkan penyajian lebih baik sesuai dengan kriteria pemilihan dan penerapan.
- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

#### 6. Informasi Komparatif

Sebuah informasi harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya terkecuali dinyatakan lain oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) termasuk dengan informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Entitas memasukkan informasi komparatif untuk sebuah informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### 7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang dianggap material disajikan dengan cara terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika baik secara individual atau secara bersama-sama serta dapat mempengaruhi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi sebuah faktor penentu.

#### 8. Laporan Keuangan Lengkap yang Diterapkan Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Laporan keuangan entitas meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan akhir periode
- b. Laporan laba rugi
- c. Catatan atas laporan keuangan

Penjelasan mengenai laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yaitu:

##### 1. Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode

Laporan posisi keuangan biasanya lazim dikenal sebagai neraca. Menurut (Kasmir, 2016:28) Laporan posisi keuangan atau neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi jumlah dari jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM, 2016) laporan posisi keuangan menyajikan informasi berupa aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan

entitas menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dapat mencakup akun-akun berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank

## 2. Laporan Laba Rugi Selama Periode

Menurut (Kasmir, 2016) Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam masa periode tertentu. Didalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, selain itu tergambar pula jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan selama masa periode tertentu. Maka dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas dalam suatu masa periode. Dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Beban pajak

## 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan atau para pemakai laporan tersebut sebab dari itu diperlukan adanya catatan atas laporan keuangan untuk menambahkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi, selain itu dapat menginterpretasikan angka-angka yang terkandung didalam laporan keuangan, maka dari itu para pemakai perlu melihat catatan atas laporan

keuangan agar dapat memahami mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam keseluruhan laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) catatan atas laporan keuangan disajikan dalam bentuk sistematis selama hal tersebut praktis dimana setiap akun didalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan berupa:

- a. Sesuatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi yang penting dan material sehingga bermanfaat bagi para pengguna untuk memahami laporan keuangan

#### 9. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi bilaperlu pada setiap halaman laporan keuangan:

1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir
2. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan mana yang lebih tepat untuk setiap komponen laporan keuangan
3. Mata uang pelaporan
4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

#### **2.2.8. Kas Basis dan Akrual Basis**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM, 2016) basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan waktu kapan pengukuran transaksi dilakukan. Dalam akuntansi terdapat 2 basis yang sering digunakan untuk mencatat terjadinya suatu transaksi yaitu basis

kas dan akrual basis. Basis kas merupakan metode pencatatan akuntansi yang mengakui terjadinya transaksi saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan. Sedangkan Akrual basis merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan apakah saat itu kas diterima atau dikeluarkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari metode kas basis biasanya terdiri atas kas dan kekayaan pemilik sedangkan laporan keuangan yang dihasilkan dari metode akrual basis mengakui adanya piutang dan utang (Rahayu, 2015).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) menyatakan bahwa salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) memutuskan untuk mempertahankan asumsi dasar tersebut agar konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lainnya. Laporan keuangan yang disusun dengan dasar akrual akan menghasilkan suatu informasi yang lebih merepresentasikan dengan tepat kondisi serta aktivitas bisnis entitas selama dan pada akhir dari masa satu periode pelaporan, sehingga membantu para pengguna laporan keuangan.

### **2.2.9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendukung terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat fleksibel, dapat dengan sangat mudah untuk beradaptasi dengan naik turunnya permintaan pasar.

Undang-Undang No.20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa definisi yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas kedalam jenis usaha kecil atau menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pertama adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara pihak administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembebanan usahanya dari modal mereka sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara atau rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum.

Berkaitan dengan pernyataan mengenai definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatas maka secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan yang mirip dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertama, jika dilihat dari sisi kekayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) cenderung merupakan suatu entitas yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kedua, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit bisnis yang modalnya lebih banyak mengandalkan dari struktur modal pribadi atau pada tingkatan yang lebih maju yang telah menggunakan bantuan yang berasal dari kredit usaha kecil. Ketiga, pada umumnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum memiliki status badan hukum. Keempat, golongan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih terbatas pada golongan usaha yang cenderung sederhana.

#### **2.2.10. Kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Secara umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah financial dan masalah non-financial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk kedalam masalah finansial yaitu sulitnya untuk mendapatkan akses kredit ataupun modal. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Biaya transaksi yang tinggi disebabkan oleh prosedur kreatif yang dapat dikatakan cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan tergolong kecil.
2. Kurangnya akses kesumber dana yang formal baik disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang cukup memadai.
3. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang tergolong cukup tinggi.
4. Banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum cukup baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan yang termasuk kedalam masalah non-finansial (organisasi manajemen) yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

2. Kurangnya pengetahuan atas pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pasar, selain karena keterbatasan suatu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3. Keterbatasannya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

#### **2.2.11. Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Elemen laporan keuangan suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

1. Neraca  
Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu periode tertentu
2. Laporan Laba Rugi  
Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode
3. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu masa periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk masa periode tersebut, pengaruh suatu perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam masa periode tersebut dan jumlah investasi oleh deviden dan distribusi lain yang memiliki kepemilikan ekuitas selama masa periode tersebut.
4. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama masa satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisikan tentang tambahan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

### 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatannya adalah membeli barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk awalnya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh pemilik usaha.

Penerapan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) agar dapat menyajikan laporan keuangan yang baik sehingga dapat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengetahui informasi keuangan dari usaha yang telah dijalkannya. Berikut merupakan bagan kerangka konseptual penelitian:

**Gambar 1.1.**

#### **Kerangka Konseptual Penelitian**

